

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
DI DESA OKMAKOT DISTRIK OKSIBIL, KABUPATEN PEGUNUNGAN
BINTANG, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

Serius Kulka

Dosen Program Studi Biologi, Universitas Okmin Papua

Correspondence

Email: serikulka22@gmail.com

No. Telp:

Submitted 23 Februari 2025

Accepted 02 Maret 2025

Published 03 Maret 2025

ABSTRAK

Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari kebijakan anggaran pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah dan desa sangat penting dalam melaksanakan kebijakan ini, di mana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat dan istiadat yang diakui. Dengan pengelolaan anggaran dana desa, kebijakan ini mendorong pemerintah desa untuk merumuskan visi dan misi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program-program unggulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi dan pengkajian data. Aktivitas dalam implementasi kebijakan ADD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, dengan mempertimbangkan faktor internal institusi. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi kebijakan ini, serta faktor pendorong yang dapat memengaruhi keberhasilan. Strategi kebijakan alokasi dana desa diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap individu dalam penggunaan anggaran, dengan harapan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat di Desa Okmakot, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2024.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Alokasi, Dana Desa, Tahun Anggaran 2024

ABSTRACT

The implementation of the Village Fund Allocation (ADD) is part of the central government's budget policy aimed at improving community welfare. The role of local and village governments is very important in implementing this policy, where villages have the authority to regulate and manage the interests of the local community based on recognized customs and traditions. With the management of the village fund budget, this policy encourages village governments to formulate a vision and mission that suits the needs of the community through superior programs. This study uses a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis is carried out by data reduction and assessment. Activities in the implementation of the ADD policy aim to improve community services, taking into account internal institutional factors. SWOT analysis is used to identify strengths and weaknesses in the implementation of this policy, as well as driving factors that can influence success. The village fund allocation policy strategy is directed at fulfilling the human rights of each individual in the use of the budget, with the hope of increasing the prosperity of the community in Okmakot Village, Oksibil District, Bintang Mountains Regency by 2024.

Keywords: Implementation, Policy, Allocation, Village Fund, Fiscal Year 2024

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2024 di Desa Okmakot, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, sangat penting untuk menggambarkan konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan yang memengaruhi pembangunan desa di daerah ini. ADD merupakan instrumen vital dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang sering kali terabaikan dalam perencanaan pembangunan nasional (Biduri et al, 2022). Dalam konteks Papua, termasuk Kabupaten Pegunungan Bintang, ADD diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan akses terhadap layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa alokasi dana desa yang dikelola

dengan baik dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti yang terlihat dalam studi di Bantul, Yogyakarta (Muslihah et al., 2019) dan Kabupaten Gunung Mas (Liani & Takari, 2024), yang menekankan pentingnya indikator yang tepat untuk mengukur perubahan sebelum dan sesudah penggunaan dana desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan alokasi dana desa sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, dan transparansi dalam pengelolaan dana (Ramadhani, 2021). Prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi memiliki dampak positif terhadap pengelolaan dana desa (Sundari et al., 2024; Solikin et al., 2023), sehingga kolaborasi yang kuat antara semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, menjadi sangat penting. Penerapan sistem pengendalian internal yang baik juga diperlukan untuk mencegah penyimpangan dalam penggunaan dana. Dalam konteks Desa Okmakot, tantangan yang dihadapi, seperti tingkat kemiskinan dan kesulitan geografis, menuntut pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan kebutuhan lokal dalam merancang dan melaksanakan program-program yang didanai oleh ADD (Ghassani et al., 2022).

Adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk aparatur desa juga sangat diperlukan agar mereka dapat mengelola alokasi dana desa dengan baik. Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan desa yang efektif akan menjamin transparansi dalam pengelolaan dana (Barus & Ginting, 2022; Susandya et al, 2022). Dengan demikian, implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Okmakot diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pengelolaan yang baik tidak hanya akan berpengaruh pada pembangunan fisik desa, tetapi juga pada pembentukan struktur sosial yang lebih kohesif dan harmonis, serta memperkuat ikatan komunitas lokal dalam menghadapi tantangan pembangunan. Dengan mempertimbangkan konteks lokal yang unik, diharapkan ADD dapat menjadi alat yang efektif dalam memberdayakan masyarakat dan mendorong pembangunan yang inklusif di daerah tersebut.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Okmakot, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, pada tahun anggaran 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan ilmiah penulis serta memahami realitas yang terjadi terkait kebijakan tersebut. Dalam analisis ini, pendekatan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi ADD. Kekuatan (*Strengths*) dari implementasi kebijakan ini mencakup dukungan dari pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam musyawarah desa. Namun, kelemahan (*Weaknesses*) yang ada, seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan komunikasi yang tidak efektif, dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Peluang (*Opportunities*) untuk meningkatkan pengelolaan ADD dapat ditemukan melalui pelatihan bagi perangkat desa dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, ancaman (*Threats*) seperti ketidakpastian politik dan tantangan geografis di daerah pegunungan dapat memengaruhi efektivitas penggunaan dana desa. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari sejarah undang-undang dan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data meliputi observasi untuk memahami perilaku dan proses kerja, serta wawancara terstruktur dengan kepala desa, sekretaris desa, dan pejabat keuangan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai visi, misi, dan pengelolaan keuangan desa. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan mengorganisasikan, menguraikan, dan

mensintesis data yang diperoleh, serta menarik kesimpulan berdasarkan verifikasi data. Penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 di kantor Desa Okmakot, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pengelolaan dana desa yang lebih efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

HASIL

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Okmakot

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Okmakot pada tahun anggaran 2024 menunjukkan berbagai dinamika yang mencerminkan tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan ini. Proses perencanaan ADD dimulai dengan musyawarah desa yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Dalam musyawarah ini, prioritas pembangunan ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang diidentifikasi melalui diskusi terbuka. Namun, meskipun proses ini dirancang untuk bersifat partisipatif, tingkat kehadiran dan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah sering kali masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya ADD dan bagaimana dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Setelah perencanaan, pelaksanaan ADD di Desa Okmakot dilakukan dengan mengacu pada rencana yang telah disepakati. Penggunaan dana desa difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam pengelolaan proyek. Banyak perangkat desa yang belum memiliki pengalaman atau pelatihan yang memadai dalam manajemen proyek, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek. Selain itu, masalah transparansi dalam penggunaan dana juga menjadi sorotan, di mana masyarakat merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai alokasi dan penggunaan dana desa.

Evaluasi penggunaan ADD di Desa Okmakot dilakukan secara berkala, namun hasil evaluasi tersebut sering kali tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini menciptakan kesenjangan informasi yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah desa telah berupaya meningkatkan transparansi dengan mengadakan pertemuan rutin untuk melaporkan perkembangan proyek dan penggunaan dana. Namun, efektivitas strategi ini masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih terlibat dan memahami proses pengelolaan dana desa.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah desa juga menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan pengelolaan ADD. Salah satunya adalah dengan mengadakan pelatihan bagi perangkat desa dan masyarakat mengenai manajemen keuangan dan proyek. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola dana desa secara efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah desa juga berusaha membangun kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk mendapatkan dukungan teknis dan sumber daya tambahan dalam pelaksanaan program-program yang didanai oleh ADD.

Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Okmakot pada tahun anggaran 2024 memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu aspek paling terlihat dari dampak ini adalah pembangunan infrastruktur dasar, yang mencakup jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan jalan yang

lebih baik telah meningkatkan aksesibilitas desa, memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah menjangkau pusat-pusat ekonomi, layanan kesehatan, dan pendidikan. Dengan adanya jalan yang layak, transportasi barang dan jasa menjadi lebih efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian lokal.

Fasilitas kesehatan juga menjadi salah satu fokus utama dalam penggunaan ADD. Dengan dana yang dialokasikan, pemerintah desa telah berhasil membangun atau merenovasi puskesmas dan posyandu, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan. Peningkatan fasilitas kesehatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan medis, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam menjaga kesehatan mereka. Program-program kesehatan yang didanai oleh ADD, seperti penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan rutin, juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan.

Di bidang pendidikan, ADD telah digunakan untuk memperbaiki dan membangun sarana pendidikan, seperti sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Pembangunan ruang kelas yang layak dan fasilitas pendukung lainnya, seperti perpustakaan dan ruang bermain, telah menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi anak-anak. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk mendukung program pendidikan non-formal, seperti pelatihan keterampilan bagi remaja dan orang dewasa, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM di desa. Dengan adanya program-program ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga keterampilan yang dapat meningkatkan peluang kerja dan pendapatan mereka.

Selain dampak terhadap pembangunan infrastruktur, ADD juga berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat lokal melalui berbagai program ekonomi dan sosial. Dana desa digunakan untuk mendukung usaha mikro dan kecil, memberikan modal awal bagi masyarakat untuk memulai usaha. Program pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh pemerintah desa, bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, telah membantu masyarakat mengembangkan keterampilan bisnis dan manajemen. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan mereka sendiri.

Pemberdayaan masyarakat juga terlihat dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan ADD. Melalui musyawarah desa, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, sehingga program-program yang dijalankan lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan lokal. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap program-program yang ada, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara warga desa.

Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Okmakot merupakan aspek krusial yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam musyawarah desa, menjadi indikator penting untuk menilai seberapa besar masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program yang didanai oleh ADD. Musyawarah desa diadakan secara rutin untuk membahas rencana penggunaan dana desa, di mana masyarakat diundang untuk memberikan masukan dan aspirasi mereka. Namun, meskipun musyawarah desa merupakan forum yang terbuka, tingkat kehadiran dan keterlibatan masyarakat sering kali masih rendah.

Beberapa faktor mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya ADD dan bagaimana dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka menjadi salah satu penghambat utama. Banyak warga yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk

terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Selain itu, faktor budaya dan sosial juga berperan, di mana masyarakat yang lebih tua atau yang memiliki posisi sosial tertentu sering kali mendominasi diskusi, sehingga suara masyarakat yang lebih muda atau kurang beruntung sering kali terabaikan. Kedua, komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat juga menjadi kendala. Informasi mengenai agenda musyawarah, tujuan penggunaan ADD, dan hasil dari musyawarah sebelumnya sering kali tidak disampaikan dengan jelas. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa tidak terinformasi dan kurang termotivasi untuk berpartisipasi. Selain itu, waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah yang tidak sesuai dengan jadwal masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja, juga dapat mengurangi tingkat kehadiran.

Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, beberapa rekomendasi dapat diterapkan. Pertama, pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya ADD dan peran serta hak masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan komunitas, penyebaran brosur, dan penggunaan media sosial untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kedua, pemerintah desa harus memastikan bahwa musyawarah desa dilaksanakan pada waktu dan tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Mengadakan musyawarah di lokasi yang strategis dan pada waktu yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat, seperti di malam hari atau pada akhir pekan, dapat meningkatkan kehadiran dan partisipasi. Ketiga, menciptakan lingkungan yang inklusif dalam musyawarah desa sangat penting. Pemerintah desa perlu mendorong semua lapisan masyarakat untuk berbicara dan memberikan pendapat mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memfasilitasi diskusi kelompok kecil sebelum musyawarah resmi, sehingga masyarakat yang lebih pendiam atau kurang percaya diri dapat menyampaikan aspirasi mereka.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2024 di Desa Okmakot, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, dapat dianalisis menggunakan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa.

1. Kekuatan (*Strengths*) dari implementasi ADD di Desa Okmakot mencakup dukungan yang kuat dari pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Pemerintah desa memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan dana desa secara efektif. Selain itu, adanya musyawarah desa yang rutin memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, sehingga program-program yang dijalankan lebih relevan dengan kondisi lokal. Kekuatan lain yang dapat diidentifikasi adalah keberadaan sumber daya alam yang melimpah di daerah tersebut, yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi lokal. Dengan potensi ini, ADD dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.
2. Namun, di balik kekuatan tersebut, terdapat kelemahan (*Weaknesses*) yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dalam pengelolaan dana desa. Banyak perangkat desa yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan yang memadai dalam manajemen proyek dan keuangan, yang dapat mengakibatkan ketidakefektifan dalam penggunaan ADD. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat juga menjadi kendala. Informasi mengenai penggunaan dana desa dan hasil dari musyawarah desa sering kali tidak disampaikan dengan jelas, sehingga masyarakat merasa kurang terlibat dan tidak

memiliki pemahaman yang cukup tentang proses pengelolaan dana. Kelemahan ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menghambat partisipasi aktif mereka.

3. Di sisi lain, terdapat peluang (*Opportunities*) yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan implementasi ADD di Desa Okmakot. Salah satunya adalah adanya program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang dapat diakses oleh perangkat desa dan masyarakat. Dengan mengikuti pelatihan ini, mereka dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dana desa secara lebih efektif. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi non-pemerintah (NGO) dapat membuka akses terhadap sumber daya tambahan dan dukungan teknis dalam pelaksanaan program-program yang didanai oleh ADD. Peluang lain yang dapat dimanfaatkan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya dorongan untuk lebih aktif terlibat, masyarakat dapat berkontribusi dalam merumuskan program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
4. Namun, implementasi ADD di Desa Okmakot juga dihadapkan pada ancaman (*Threats*) yang perlu diwaspadai. Salah satu ancaman utama adalah ketidakpastian politik dan kebijakan yang dapat memengaruhi alokasi dana desa di masa depan. Perubahan kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah dapat berdampak pada kestabilan dan keberlanjutan program-program yang telah direncanakan. Selain itu, tantangan geografis di daerah pegunungan, seperti aksesibilitas yang sulit dan kondisi cuaca yang tidak menentu, dapat menghambat pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Ancaman lain yang perlu diperhatikan adalah potensi penyalahgunaan dana desa, yang dapat terjadi jika tidak ada sistem pengendalian internal yang baik. Penyalahgunaan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan alokasi dana desa pada tahun anggaran 2024 di Desa Okmakot Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, perlu dianalisis dengan memperhatikan pengalaman dan hasil penelitian sebelumnya. Kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pengelolaan fiskal yang baik, tetapi juga membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai konteks sosial dan ekonomi dari desa tersebut. Dalam konteks ini, banyak kajian yang menyoroti tantangan serta pendekatan dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa.

Salah satu kajian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyono dan Susantyo, yang mengeksplorasi mekanisme Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam proses pengumpulan data di lapangan, termasuk keandalan instrumen dan kesulitan mendapatkan data dari masyarakat. Penelitian ini mencerminkan bahwa tantangan serupa mungkin akan dihadapi di Desa Okmakot saat implementasi kebijakan alokasi dana desa, di mana keterlibatan aktif masyarakat dan pengelolaan data yang tepat menjadi kunci keberhasilan program (Wahyono & Susantyo, 2023).

Pemahaman mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut juga harus dilihat dari perspektif ekonomi lokal, yang dikelilingi oleh isu-isu kemiskinan dan ketimpangan yang sering ditemukan di daerah pedesaan. Penelitian oleh Marasabessy et al. menunjukkan pentingnya pendekatan yang mempertimbangkan norma sosial dan keunikan lokal dalam proses pengembangan untuk mencegah kesenjangan dan permasalahan sosial di komunitas yang bersangkutan (Marasabessy et al., 2023).

Sementara itu, kebijakan alokasi dana desa juga harus diintegrasikan dengan upaya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Triyanti et al. menanggapi perubahan paradigma pembangunan yang mengarah pada pendekatan berbasis sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Mereka menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, dibutuhkan strategi yang menyamakan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka (Triyanti et al., 2023). Sebagai desa yang berada di wilayah pegunungan, Desa Okmakot bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara bijaksana untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program terkait alokasi dana desa sangat ditentukan oleh bagaimana data serta informasi dikelola dan digunakan dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran (Delfirman & Erwinsyah, 2023). Secara keseluruhan, tantangan dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Okmakot merupakan refleksi dari berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari pengumpulan data yang akurat hingga pendekatan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2024 di Desa Okmakot, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, menunjukkan potensi yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan lokal. Meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, komunikasi yang tidak efektif, dan ketidakpastian politik, kekuatan seperti dukungan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang aktif dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif dan transparan, serta meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, diharapkan ADD dapat dikelola secara efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan ini, serta belajar dari pengalaman daerah lain untuk mengadaptasi strategi yang sesuai dengan konteks lokal di Desa Okmakot.

DAFTAR PUSTAKA

- Barus, V. and Ginting, M. (2022). Analisis Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 12(2), 105-114. <https://doi.org/10.55601/jwem.v12i2.909>
- Biduri, S., Fitriyah, H., & Febriana, P. (2022). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner*, 6(4), 4021-4036. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1085>
- Erwinsyah, R. (2023). Impian Pendatang, Tantangan Pendataan: Upaya Memahami Silang Sengkarut Kependudukan di Episentrum Pariwisata Lombok Utara. <https://doi.org/10.55981/brin.775.c696>
- Ghassani, S., Priyarsono, D., Rindayanti, W., & Seminar, A. (2022). Analisis Pembangunan Wilayah Melalui Program Dana Desa di Kabupaten Bogor: Pendekatan Teori Kelembagaan. *Majalah Geografi Indonesia*, 37(1), 48. <https://doi.org/10.22146/mgi.75432>
- Liani, Y. and Takari, D. (2024). Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(11), 4810-4825. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i11.1760>
- Marasabessy, I., Bahalwan, F., Badarudin, M., Fahrudin, A., Imran, Z., & Agus, S. (2023). Pengelolaan Wilayah Kepulauan Timur Indonesia Untuk Mencegah Tragedy Of The Commons. <https://doi.org/10.55981/brin.908.c766>

- Muslihah, S. and Siregar, H. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 7(1), 85-93. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v7i1.1027>
- Ramadhani, N. and Yuliati, A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 561-571. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.2331>
- Solikin, A., Yulianto, I., & Prabowo, S. (2023). Pengembangan Usaha Pengelolaan Sampah Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sinergi Kabupaten Purwakarta Dengan Business Road Map. *Eqien Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(03), 305-314. <https://doi.org/10.34308/eqien.v12i03.1489>
- Sundari, S., Astriani, D., & Sujaya, F. (2024). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa se-Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2726-2742. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1378>
- Susandya, A., Putra, M., Bagiana, I., Cahyani, M., & Aristanti, I. (2022). Determinan Pencegahan Kecurangan Dalam Alokasi Dana Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(3), 659-671. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i3.22363>
- Triyanti, R., Amri, K., & Latuconsina, H. (2023). Perspektif Kebijakan dan Peran Penting Riset Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Berkelanjutan. <https://doi.org/10.55981/brin.908.c819>
- Wahyono, E. and Susantyo, B. (2023). Dari KM 0 (nol), Ujung Barat Indonesia: Mencari Makna di Balik Data. <https://doi.org/10.55981/brin.777.c711>